

Dari Pinggiran ke Pusaran Revolusi: Sejarah Sehari-hari dan Transformasi Sosial di Suliki, 1945-1949

Novrila Safitri

Affiliation: Universitas Andalas

Email: novrila.safitri@gmail.com

Received: Desemberr 2025; Accepted: Desember 2025

Abstrak

Artikel ini meneliti dinamika Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949) dari perspektif mikro, dengan menitikberatkan pada pengalaman sejarah sehari-hari masyarakat di Kewedanaan Suliki, Sumatera Barat. Melalui metode sejarah yang mengandalkan sumber primer arsip dan, khususnya, wawancara mendalam dengan pelaku dan saksi sejarah, penelitian ini merekonstruksi bagaimana sebuah daerah pedalaman tiba-tiba berubah menjadi episentrum perjuangan setelah dipilih sebagai basis Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 1948. Temuan kajian mengungkap bahwa revolusi di Suliki tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa militer, tetapi lebih sebagai proses transformasi sosial yang mendalam. Dukungan masyarakat diekspresikan melalui praktik keseharian seperti penyediaan logistik, penyediaan tempat tinggal, kerja di dapur umum, dan partisipasi dalam barisan perlawanan lokal (BPNK). Solidaritas yang terbangun antara pejabat PDRI dan warga lokal menciptakan ekosistem dukungan yang intim, mengaburkan batas antara front perang dan kehidupan domestik. Studi ini menyimpulkan bahwa ketahanan Republik dalam masa darurat sangat ditopang oleh jaringan sosial dan agensi masyarakat akar rumput di tingkat lokal, serta menawarkan perspektif bahwa pusat gravitasi revolusi dapat bergeser dan ditemukan dalam narasi-narasi kecil di daerah yang dianggap pinggiran.

Kata Kunci: Sejarah Sehari-hari, Revolusi Nasional Indonesia, PDRI, Suliki, Sejarah Lokal, Mikrohitori, Transformasi Sosial.

Abstract

This article examines the dynamics of the Indonesian National Revolution (1945-1949) from a micro-perspective, focusing on the everyday historical experiences of the community in the Suliki District, West Sumatra. Utilizing historical methods that rely on archival primary sources and, in particular, in-depth interviews with historical actors and witnesses, this research reconstructs how a remote hinterland was abruptly transformed into an epicenter of the struggle after being chosen as the base for the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) in 1948. The findings reveal that the revolution in Suliki was not merely understood as a military event, but more profoundly as a process of deep social transformation. Community support was expressed through daily practices, including logistics provision, housing, work in public kitchens, and participation in local resistance forces (BPNK). The solidarity forged between PDRI officials and local residents created an intimate support ecosystem, blurring the lines between the war front and domestic life. This study concludes that social networks and the agency of grassroots communities at the local level were crucial in underpinning the resilience of the Republic during the emergency period. It offers the perspective that the revolutionary center of gravity

could shift and be found within the small-scale narratives of areas considered peripheral.

Keywords: Everyday History, Indonesian National Revolution, PDRI, Suliki, Local History, Microhistory, Social Bonds.

Pendahuluan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta menandai dimulainya sebuah fase revolusi bangsa, yang tidak hanya sekadar pergantian pemerintahan dari pendudukan Jepang ke Republik Indonesia, tetapi juga proses panjang dalam membentuk dan mempertahankan kedaulatan.¹ Langkah institusional segera diambil dengan dibentuknya pemerintahan baru melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang mengesahkan konstitusi pertama melalui Komisi Tujuh.² Dengan demikian, landasan negara baru telah diletakkan, meskipun tantangan terberat justru datang dari upaya mempertahankannya secara fisik. Dalam konteks nasional, revolusi fisik sering dikaitkan dengan perlawanan terhadap Belanda yang berusaha kembali melalui NICA, dimana menurut George McTurnan Kahin, eskalasi konflik meningkat signifikan dari bentrokan patroli

menjadi perang terbuka setelah agresi militer Belanda.²

Di tingkat daerah, respons terhadap proklamasi berlangsung cepat namun dengan dinamika lokal yang khas. Seperti di Sumatera Barat, berita kemerdekaan segera disambut oleh tokoh-tokoh pro-Republik yang membentuk wadah perjuangan, seperti Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI). Awalnya, menurut Mestika Zed, BPPI memainkan peran yang dominan namun tidak terlalu revolusioner, lebih menonjolkan karakter institusi sipil dalam mengambil alih kekuasaan dari Jepang.³ Di tempat lain, terbentuk Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang semula menunjukkan dualisme orientasi dengan BPPI, sebelum akhirnya bersatu pada akhir Agustus 1945 untuk menyongsong revolusi sesuai arahan pemerintah pusat.⁴

Aspek militer revolusi juga berkembang secara organik. Pemerintah pusat membentuk Badan

¹ Lihat George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Jakarta: UNS dan Sinar Harapan, 1995), hlm. 174-175.

² *Ibid.*, hlm. 178.

³ Lihat Mestika Zed, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan* (Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2004), hlm. 20.

⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

Keamanan Rakyat (BKR) pada akhir Agustus 1945, yang kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945.³ Sebagai organisasi militer pertama Republik Indonesia, TKR menghadapi keterbatasan persenjataan yang diatasi dengan berbagai cara, mulai dari diplomasi hingga perampasan terhadap tentara Jepang, yang tak terelakkan menimbulkan berbagai pertempuran revolusioner di berbagai kota.⁴ Di Sumatera Barat, pembentukan BKR (dan kemudian TKR) diisi oleh mantan Gyugun dan Heiho, namun menghadapi kendala komando yang tidak terpusat di bawah pimpinan Ismael Lengah dan Dahlan Djambek, sehingga perjuangan awal menghadapi kedatangan NICA menjadi kurang terorganisir.

Sebelum Agresi Militer Belanda Kedua, periode revolusi di Sumatera Barat justru banyak diwarnai oleh konflik internal antara elite sipil lokal dan proses rasionalisasi tentara, yang meliputi perbedaan pendapat antar kelompok serta tuntutan kejelasan status anggota militer. Situasi ini berubah drastis ketika Agresi Militer Belanda Kedua dilancarkan, yang dianggap sebagai titik puncak dramatis dalam konfrontasi Indonesia-Belanda dan menjadi awal revolusi yang sesungguhnya di daerah tersebut. Konflik internal pun mereda demi menyelamatkan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada titik inilah, peran Suliki menjadi sentral.⁵

Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Suliki menjadi momen paling dramatis dan krusial bagi kelangsungan Republik, sekaligus membawa transformasi mendalam bagi masyarakat setempat. Sebagai daerah yang awalnya terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk pergerakan nasional, Suliki tiba-tiba menjadi episentrum revolusi. Kehadiran PDRI membawa suasana baru dengan masuknya para pengungsi dan elite politik pendukung NKRI, yang secara drastis mengubah tatanan sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Perubahan sosial yang tiba-tiba inilah yang menjadi fokus kajian untuk memahami dampak mikro dari revolusi terhadap masyarakat lokal, sebagaimana tercermin dalam penelitian berjudul "Suliki Masa Revolusi Tahun 1945-1949 ini.

Di balik narasi agung revolusi kemerdekaan Indonesia yang sering didominasi oleh pertempuran heroik dan diplomasi elite, tersembunyi sebuah realitas yang lebih personal dan kompleks: bagaimana gelombang revolusi yang dahsyat itu sesungguhnya menerpa dan mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat di tingkat akar rumput. Suliki, yang semula merupakan

⁵ *Ibid.*, hlm. 77.

daerah terpencil dan tenang di Sumatera Barat, tiba-tiba terlempar ke dalam pusaran sejarah sebagai tempat berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pergeseran mendadak ini menciptakan sebuah "laboratorium sosial" yang unik, di mana tatanan tradisional bertemu dengan darurat militer, dan kesetiaan pada republik yang abstrak diuji dalam praktik keseharian yang nyata. Permasalahan mendasar yang ingin diungkap di sini adalah kesenjangan antara sejarah nasional yang monolitik dengan pengalaman mikro yang beragam dan sering kali paradoks, dengan fokus pada bagaimana warga biasa di Suliki menjalani, menafsirkan, dan menghidupi makna revolusi dalam rutinitas mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama penelitian ini adalah, bagaimana praktik-praktik keseharian pada masyarakat Suliki membentuk sekaligus merepresentasikan pengalaman mereka yang unik selama periode revolusi (1945-1949), dan melampaui narasi heroik-militeristik yang dominan? Pertanyaan ini berusaha menelusuri tidak hanya *apa yang terjadi*, tetapi lebih dalam lagi, *bagaimana* revolusi itu dihidupi; bagaimana nilai-nilai republik yang baru lahir diterjemahkan ke dalam bahasa tindakan sehari-hari, bagaimana masyarakat bernegosiasi

dengan ketakutan dan harapan, serta bagaimana identitas sebagai "warga Indonesia" ditempa di tengah hiruk-pikuk pengungsian dan konflik.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun sebuah narasi sejarah sosial yang otentik, dan manusiawi dengan menempatkan suara dan ingatan kolektif masyarakat Suliki sebagai pusat cerita. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi perubahan mendadak dalam tatanan sosial mereka, bukan semata sebagai objek pasif dari peristiwa nasional, melainkan sebagai aktor yang aktif berstrategi. Dengan menekankan pada "cerita-cerita kecil" yang sering terabaikan kajian ini berupaya mengungkap wajah lain dari revolusi: sebuah proses yang berdarah dan penuh ketidakpastian, tetapi sekaligus membentuk solidaritas, kerentanan, dan ketahanan manusia yang paling mendasar.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis dengan pendekatan kualitatif untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara komprehensif dan mendalam. Tahapan penelitian dimulai dengan heuristik, yakni mengumpulkan sumber-sumber primer baik berupa dokumen resmi pemerintah, arsip daerah, surat kabar kontemporer, dan catatan pribadi dari periode 1945-1949, serta sumber sekunder dari literatur yang relevan. Data-data

tertulis ini kemudian dikritik secara eksternal dan internal untuk memastikan keaslian dan kredibilitasnya. Secara paralel, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pelaku sejarah dan tokoh masyarakat Suliki yang menyaksikan atau terlibat langsung dalam dinamika revolusi, di mana data lisan ini berfungsi untuk mengisi celah narasi, memberikan sudut pandang subjektif yang otentik, dan mengkonfirmasi atau bahkan mempertanyakan temuan dari dokumen. Seluruh data yang telah terverifikasi kemudian disintesis melalui proses interpretasi dan analisis untuk dibangun menjadi suatu narasi sejarah yang koheren, yang tidak hanya menceritakan "apa yang terjadi" tetapi juga menganalisis "mengapa" dan "bagaimana" revolusi membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat Suliki, dengan senantiasa mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang melingkupinya.

Hasil dan Pembahasan

Militarisasi Pemerintahan dan Mobilisasi Rakyat di Suliki

Pada akhir bulan Desember 1948, Residen Mr. St. Moh. Rasjid berkoordinasi dengan Panglima Tentara Teritorial Sumatera (PTTS) Kolonel Hidayat serta Letnan Kolonel

A. Tahir guna membahas strategi perjuangan dalam menghadapi tentara Belanda, dengan fokus utama pada aspek pertahanan.⁶ Menyusul serangan Belanda, Pemerintahan Sumatera Barat secara resmi mengalami militerisasi. Berdasarkan Ketetapan Panglima Tentara dan Territorium Sumatera Nomor WKS/SI/Ist 038 tanggal 2 Januari 1949, daerah Sumatera Barat ditetapkan sebagai daerah militer yang dipimpin oleh Gubernur Militer Mr. St. Moh. Rasjid dengan wakilnya, Komandan Sub Territorium Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim. Seluruh struktur pemerintahan sipil kemudian dimiliterisasi, mencakup posisi bupati, wedana, camat, dan wali negeri yang bergelar wali negeri perang, sementara kepolisian juga diberikan pangkat tituler sesuai dengan ketentuan militer.⁷

Pertimbangan utama pembentukan daerah militer tersebut adalah keadaan negara yang sedang berperang, terfragmentasinya instansi pemerintahan, serta tuntutan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tegas terkait masalah pertahanan. Markas Pertahanan Rakyat Nagari (MPRN) diintegrasikan ke dalam badan pemerintahan di setiap nagari. Setiap nagari dipimpin oleh seorang wali perang dan MPRN, yang memainkan

⁶ Lihat Saiful SP, *Luhak Lima Puluh Kota Basis Pemerintah Darurat Republik Indonesia*

(Sarilamak: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, 2009), hlm. 62.

⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

peran sentral dalam perjuangan. Kelangsungan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan pemerintahan militer sangat bergantung pada dukungan aktif dari rakyat di tingkat nagari. Rakyat berfungsi sebagai penyedia utama logistik, sementara para pemuda menerima pelatihan militer dan berjuang di garis depan bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta Pasukan Mobil Teras atau yang dikenal sebagai Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK).

Kewedanaan Suliki mengalami kepadatan penduduk akibat banyaknya pengungsi yang memasuki wilayah tersebut. Pemerintah kemudian membagi Kewedanaan Suliki menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Suliki dengan ibu negeri di Suliki dan Kecamatan Gunung Mas dengan ibu negeri di Kototinggi.⁸ Sebagai respons terhadap situasi ini, dibentuklah Badan Penyelenggara Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang memiliki tugas pokok antara lain mendirikan dapur umum di tingkat kenagarian atau jorong, menyediakan tempat tinggal, mengumpulkan sumbangan berupa beras dan sayur-mayur, serta memungut sumbangan dari para pedagang yang beraktivitas di pasar-pasar yang berada di wilayah Kewedanaan Suliki.⁹

Struktur pemerintahan militer di tingkat kecamatan kemudian diisi. Kecamatan Militer Gunung Mas dipimpin oleh Camat Militer S.M. Aziz dengan susunan wali perang sebagai berikut:

- a. Nagari Kototinggi: R. Dt. Majo Basa
- b. Nagari Baruahgunuang: Kailani
- c. Nagari Kototangah: A. Wahid Dt. Bandaro Sati
- d. Nagari Talanganau: Dt. Cangang
- e. Nagari Pandamgadang: Dt. Nan Gadang

Sementara itu, Kecamatan Militer Suliki berada di bawah Camat Militer A. Dt. R. Malano dengan wali perang:

- a. Nagari Limbanang: B. Dt. Bandaro Nan Tinggi
- b. Nagari Sungairimbang: M. Syarif
- c. Nagari Suliki: Dt. Imam Darwis
- d. Nagari Kurai: Syarkawi Dt. Panjahik Ameh
- e. Nagari Banjalaweh: Rusi Dt. Mangkuto
- f. Nagari Maek: Nawin.¹⁰

Pada akhir Januari 1949, Gubernur Militer mengeluarkan

⁸ Lihat *Manuskrip*, Perjuangan-perjuangan PDRI, 1980.

⁹ Lihat Saiful SP, *op.cit.* hlm. 121.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

Instruksi Nomor 10/GM/Instr tentang pembagian kerja antarinstansi. Tugas wali negeri perang meliputi menjaga keamanan dan ketertiban umum di negerinya dengan bantuan BPNK, mengawasi lalu lintas orang dan menyelidiki aktivitas mata-mata musuh, menyediakan tempat bagi pengungsi, menginstruksikan pengerjaan tanah kosong oleh pengungsi termasuk pegawai, tentara, dan polisi yang tidak bertugas, menjalankan pemungutan iuran perang negara sebesar 10 persen, serta menjalin kerja sama dengan segala lapisan masyarakat tanpa memandang pangkat dan kedudukan dengan kesadaran penuh bahwa negara sedang dalam keadaan perang.¹¹ Selanjutnya, berdasarkan ketetapan Gubernur Militer Nomor 31/GM/BB-49, camat militer bertugas mengoordinasi tenaga wali negeri perang beserta pembantunya dengan memberikan petunjuk, melakukan kunjungan ke nagari-nagari, mengawasi pelaksanaan peraturan pemerintah, bersama wali negeri perang menjamin kecukupan makanan bagi tentara, pegawai, dan rakyat yang berjuang melalui hasil pemungutan iuran 10 persen, serta menjalankan tugas sebaik mungkin.¹² Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melibatkan seluruh lapisan

masyarakat hingga tingkat desa. Kekuatan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja dinilai tidak memadai untuk menghadapi tentara Belanda yang dilengkapi persenjataan modern, sehingga dukungan masyarakat desa menjadi faktor yang sangat menentukan.

Wilayah Suliki mulai menerima kedatangan pengungsi dari Payakumbuh dan daerah lainnya pada akhir Desember 1948, menyusul dikuasainya Kota Payakumbuh dan sekitarnya oleh tentara Belanda. Selain arus pengungsi, kehadiran tokoh-tokoh PDRI yang mendirikan pusat kegiatan di Suliki, tepatnya di Kototinggi, turut menandai dinamika kawasan ini.¹³ Pada tanggal 20 Desember 1948, rombongan perwira militer yang dipimpin Kolonel Syarif Usman beserta anggotanya tiba di Kototinggi.¹⁴ Sehari kemudian, pada 21 Desember 1948, rombongan yang dipimpin Mr. St. Moh. Rasjid, selaku Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan Pemuda, dan Perburuhan dalam kabinet PDRI, beserta pemimpin seperti Chatib Sulaiman dan Ahmad Datuak Simarajo (Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau), juga tiba di Suliki. Di hadapan masyarakat Kototinggi, Mr. St. Moh. Rasjid menyampaikan pidato pembukaannya dalam bahasa

¹¹ *Ibid.*, hlm. 87.

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Jon Isnaini, "Nagari Kototinggi Pada Masa PDRI (1948-1949)", *Skripsi*,

(Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1996).

¹⁴ *Manuskri, op.cit.* hlm. 8.

Minangkabau: "...Kini ko kito bajuang lai. Supayo masyarakaek Kototinggi ikuik pulo bajuang malawan Balandu..." (Sekarang saatnya kita mulai berjuang, supaya masyarakat Kototinggi ikut pula berjuang melawan Belanda).¹⁵

Kedatangan Mr. St. Moh. Rasjid beserta rombongan dan pidato yang disampaikannya mengindikasikan signifikansi peran daerah Suliki umumnya dan Kototinggi khususnya dalam perjuangan selanjutnya. Hari-hari pertama kedatangan rombongan PDRI di Suliki diisi dengan kegiatan pembenahan pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai residen atau kepala pemerintahan di Sumatera Barat, Mr. St. Moh. Rasjid mengeluarkan dua instruksi penting. Pertama, melakukan perombakan susunan pejabat pemerintahan yang akan mendukung pelaksanaan tugasnya. Kedua, menyesuaikan struktur pemerintahan daerah seiring dengan berdirinya PDRI.¹⁶

Dalam menjalankan tugasnya, Mr. St. Moh. Rasjid juga melakukan kunjungan ke berbagai daerah guna melakukan konsolidasi perjuangan, antara lain ke Nagari Baruahgunuang, salah satu nagari dalam wilayah Suliki yang berjarak sekitar 14 kilometer dari Kototinggi dan sekitar 54 kilometer dari Kota

Payakumbuh.¹⁷ Kunjungan tersebut dilakukan dengan menaiki sebuah sedan hitam, diikuti satu kendaraan lain yang membawa anggota Mobrig (kini Brimob). Kedatangan kendaraan bermotor menjadi pemandangan yang tidak biasa bagi masyarakat setempat, yang telah lama tidak menyaksikan kendaraan roda empat sejak revolusi fisik bergulir. Mr. St. Moh. Rasjid berhenti di depan pasar Baruahgunuang. Meskipun bukan hari pasar, suasana hari itu berubah ramai layaknya hari pasar akibat banyaknya warga yang berkerumun menyaksikan kedatangan kendaraan tersebut. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai peristiwa, identitas tamu, dan alasan kedatangan mereka.¹⁸

Wali Perang Nagari Baruahgunuang, Umbuik Kailani, beserta Ketua BPNK Syafri dan pemuka masyarakat setempat menyambut kedatangan tamu tersebut. Umbuik Kailani kemudian memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang datang adalah Gubernur Militer Sumatera Barat, Mr. St. Moh. Rasjid, beserta pengawal dan rombongannya.¹⁹ Saat Mr. St. Moh. Rasjid keluar dari sedan hitam, masyarakat berdesak-desakan menyambutnya dengan salam kekeluargaan. Pada momen tersebut,

¹⁵ Lihat Mestika Zed, *op.cit.* hlm. 135.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁷ Lihat Marah Joenoes, *MR.H. ST. Moh. Rasjid: Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani, dan Jujur* (Pekanbaru:

PT. Cerya Riau Mandiri Printing, 2013). hlm. 119.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁹ *Ibid.*

suasana perang seakan terlupakan, tergantikan oleh kegembiraan atas

Emas. Bahkan jiwa pun ikut mereka korbankan dengan ikut



Gambar 1. Kantor PDRI di Suliki. Sumber: Dokumentasi Novrila

kedatangan tamu tersebut, meskipun hanya untuk sesaat.

Mr. St. Moh. Rasjid dan rombongannya kembali ke Kototinggi pada sore harinya. Pada minggu-minggu pertama, PDRI kedatangan para pejabat, mulai dari residen dan stafnya hingga anggota tentara, yang memadati Kototinggi hingga mencapai jumlah sekitar 700 orang.²⁰ Meskipun jumlah tersebut memberatkan penduduk setempat dalam hal penyediaan pangan dan tempat tinggal, masyarakat Suliki menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Mengenai kebaikan budi dan pengorbanan masyarakat Suliki, Mr. St. Moh. Rasjid menyatakan sebagai berikut:

“Bukan hanya yang berwujud materi saja yang dikorbankan rakyat Kecamatan Gunung

pergi ke front di sekitar Payakumbuh untuk bertempur dengan Belanda. Tidaklah kuat rasanya saya menuliskan bagaimana menanggung beban utang budi dan pengorbanan semua rakyat seluruh kecamatan itu. Sampai nyawa bercerai dengan badan tak akan saya dapat melupakan kebaikan hati mereka.”²¹

Pada akhir Desember 1948, para pejabat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) disambut dengan euforia oleh masyarakat. Sambutan tersebut tidak hanya berupa kegembiraan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk aksi sukarela penduduk yang menyediakan nasi bungkus bagi para pemimpin tersebut. Para pemimpin PDRI selanjutnya didorong oleh

²⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

²¹ *Ibid.*, hlm. 116.

masyarakat untuk memberikan berbagai penerangan mengenai situasi yang terjadi pada masa itu. Pada hari yang sama, pimpinan PDRI telah menggelar rapat umum yang dihadiri oleh penduduk setempat beserta pengungsi dari wilayah luar Suliki. Kantor walinagari kemudian difungsikan oleh pejabat PDRI sebagai pusat kegiatan yang mencakup aspek militer, sipil, keamanan, distribusi jatah natura, serta penerimaan sumbangan. Kantor inilah yang pada perkembangannya dikenal dengan sebutan “Gedung Perjuangan.”²²

Di samping menyediakan bahan pangan dan nasi bungkus, masyarakat Suliki juga secara sukarela menyerahkan rumah mereka untuk dijadikan tempat tinggal dan kantor bagi para pembesar PDRI. Sementara itu, selain menangani persoalan politik yang berkaitan dengan eksistensi Indonesia di tingkat domestik dan internasional serta urusan militer, para pejabat PDRI juga berupaya membangun wilayah Suliki melalui sejumlah inisiatif. Inisiatif tersebut antara lain pendirian SMP Perjuangan di Kototinggi, pembangunan rumah sakit Lakuang, serta penerapan kewajiban sumbangan dari daerah-daerah lain berupa beras, lauk pauk, garam,

minyak goreng, minyak bakar, kertas, dan barang-barang lainnya.²³ PDRI juga aktif menggalang sumber-sumber dana perjuangan dari masyarakat. Menurut N. Datuk Majo Tunaan dan R. Datuk Boyom,²⁴ sumber pendanaan perjuangan PDRI di Suliki diperoleh dari berbagai cara. Salah satunya adalah bantuan sukarela yang dikumpulkan dari setiap rumah tangga di Suliki. PDRI juga memungut iuran perang dalam bentuk pajak penghasilan sebesar 10 persen, serta membebankan biaya surat-menyurat bagi yang ingin masuk atau keluar dari Suliki. Di samping itu, PDRI menerbitkan obligasi sebagai pinjaman pemerintah kepada masyarakat, serta meminjam barang-barang berharga, padi, dan ternak dari penduduk. Seluruh sumber dana tersebut dikoordinasikan oleh pihak yang disebut wali perang.²⁵

Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Suliki, bangunan ini berfungsi sebagai kantor bagi para elite PDRI untuk melaksanakan berbagai pertemuan. Terletak di Jorong Kampung Melayu, Kototinggi, bangunan tersebut menempati posisi strategis mengingat Jorong Kampung Melayu merupakan pusat pemerintahan Nagari Kototinggi yang terletak di tengah kawasan nagari sehingga

²² Lihat *Manuskrip, op.cit.* hlm. 8-9.

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁴ Lihat N. Datuk Majo Tunaan dan R. Datuk Boyom, *Manuskrip, Sumber-sumber Dana Perjuangan PDRI.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

mudah diakses oleh masyarakat dari jorong-jorong lainnya.

Menurut penuturan Sudirman :

“Pado maso PDRI dulu tu masyarakat awak ko, urang Slikih umumnya dan urang Kototinggi pado khususnyo itu ndak mraso borek dalam manrimo rombongan PDRI. Urang awak ko inyo sonang bisa mambantu pejabat nan tibo. Rumah- rumah bosorahkan sa ko pejabat nan tibo tu, ado rumah nan dijadian kantua, ado nan untuak tompek tingga, dan masyarakat nan rumahnyo dipakai dek pejabat tu poi tingga ko dangau-dangau diampiang sawah dan poraknyo.

umumnya dan orang Kototinggi pada khususnya itu tidak merasa keberatan dalam menerima rombongan PDRI. Masyarakat kita disini senang bisa membantu pejabat yang datang. Rumah-rumah diserahkan ke pejabat yang datang, ada rumah yang dijadikan kantor, ada yang untuk tempat tinggal, dan masyarakat yang rumahnya dipakai oleh pejabat pergi tinggal ke dangau-dangau dekat sawah dan ladang mereka.”²⁶

Pada periode yang sama, pasukan Belanda memasuki wilayah Suliki pada awal Januari 1949 dengan membawa satu truk dan



Gambar 2. Jembatan Tidian Dalam. Sumber: Dokumentasi Novrila Safitri

(Pada masa PDRI dulu masyarakat kita, orang Suliki

empat jip yang penuh berisi pasukan.²⁷ Saat invasi tersebut

²⁶ Wawancara dengan Sudirman tanggal 29 Juli 2017 di rumahnya Nagari Talanganau.

²⁷ Lihat Rusli Said, *Mengenang dan Memperingati Peristiwa Sejarah*

terjadi, Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim tengah berada di Nagari Pandam Gadang bersama Mayor Thalib serta sejumlah anggota pasukan. Setelah mendapat kabar mengenai masuknya Belanda ke Suliki, Dahlan Ibrahim segera kembali ke Kototinggi. Sepanjang perjalanan, ia memerintahkan masyarakat yang dijumpainya untuk menyebarkan informasi tersebut serta menginstruksikan Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) untuk mengerahkan aksi gotong royong gerak membongkar Jembatan Titian Dalam di Pandam Gadang.²⁸

Pada masa lalu, sebuah jembatan kayu berfungsi sebagai penghubung antara Pandamgadang dan Kototinggi. Jembatan tersebut kemudian dibongkar oleh Badan Pemberantas Negara Keamanan (BPNK) beserta masyarakat setempat dalam upaya menghambat pergerakan pasukan Belanda. Berbeda dengan kondisinya yang sekarang, pada era Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), jembatan itu masih terbuat dari material kayu, dan kayu-kayu inilah yang kemudian dibongkar oleh BPNK. Selain itu, BPNK juga mendapat perintah untuk membelintangkan kayu serta menempatkan batu-batu besar di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh tentara Belanda. Di Jorong Kotomarapak, Nagari

Pandamgadang, dua anggota BPNK, yaitu Mufni dan Muslim, diperintahkan untuk turun dari jip dan mengambil posisi di balik sebuah batu besar di pinggir jalan, bersiap untuk melepaskan tembakan begitu pasukan Belanda terlihat, dengan tujuan memperlambat laju pergerakan mereka.²⁹

Berdasarkan ingatan Dt. Rajo Imbang, diceritakan bahwa sekitar pukul sembilan pagi, tentara Belanda tiba di Jorong Kotomarapak, tepatnya di sekitar Jembatan Titian Dalam. Anggota BPNK dan para partisipan yang sedang bergotong royong segera melarikan diri setelah diketahui oleh pasukan Belanda. Tentara Belanda kemudian mulai melepaskan tembakan yang mengakibatkan gugurnya sembilan orang anggota BPNK. Salah seorang anggota BPNK, Dirin, yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang arit kayu, tidak dapat melarikan diri dan memilih bersembunyi di balik pintu kedainya sambil membawa golok. Ketika seorang tentara Belanda memasuki kedai Dirin, terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak lama kemudian, datang tentara Belanda lainnya yang langsung menembak Dirin, sehingga mengakibatkan gugurnya Dirin bersama delapan anggota BPNK lainnya.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Kumpulan Makalah PDRI.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

“Blando mulai masuak ka daerah Slikih itu topeknyo ari noyan 10 Januari 1949. Blando tibo jo ciek oto godang dan ompek oto jeep. Pado saat itu pak Dahlan seorang letkol sodang di Ngori Pandam Gadang jo anggotanyo. Dapek koba kalau Blando lah di Slikih lansuang pak Dahlan jo anggotanyo cako puta arah ko Kototinggi. Dispanjang jalan ko mudiak diagiah tau lah urang-urang maso Blando ko lah masuak Slikih. BPNK disuruah untuak mambongka jambatan titian dalam supayo Blando ndak bisa ko Kototinggi pusat PDRI. Ndak hanyo itu, kayu-kayu jo batu-batu godang di blintangkan di jalan untuak ma ambek Blando. Skitar pukua sambilan pagi tu, Blando sampai di ujuang titian dalam jo keadaan BPNK jo masyarakat sodang mambongka jambatan, dulu kan jambatan tu kayu-kayu nan disusun baru olun mode kini leh. Dek Blando lah tibo lansuang urang-urang nan bakrojo ko mlarikan diri. Blando dapek manembak anggota BPNK nan lah tlambek lari. Ado surang namonyo Dirin lari ko dalam lopou sambia mamogang sabik dikoja dek Blando dan akianyo konai tembak jo dek Blando. Maninggalah sambilan urang di jambatan Titian Dalam tu.

(Belanda mulai masuk ke daerah Suliki itu tepatnya hari Senin 10 Januari 1949. Belanda datang dengan satu mobil besar dan empat mobil jeep. Pada saat itu Pak Dahlan seorang letkol sedang di Nagari Pandamgadang bersama anggotanya. Dapat kabar kalau Belanda sudah di Suliki langsung Pak Dahlan bersama anggotanya tadi putar arah ke Kototinggi. Di sepanjang jalan ke mudik (arah ke Kototinggi) di beritahukanlah kepada orang-orang bahwa Belanda sudah masuk Suliki. BPNK di suruh untuk membongkar jembatan Titiandalam supaya Belanda tidak bisaa ke Kototinggi pusat PDRI. Tidah hanya itu, kayu-kayu dan batu-batu besar di letakkan di jalan untuk menghambat Belanda. Sekitar pukul Sembilan pagi, Belanda sampai di ujung Titiandalam dengan keadaan BPNK bersama masyarakat sedang membongkar jembatan, dulu jembatan itu hanya kayu-kayu yang di susun belum seperti yang sekarang ini. Karena Belanda sudah datang langsung orang-orang yang bekerja melarikan diri. Belanda berhasil menembak anggota BPNK yang terlambat melarikan diri. Ada satu namanya Dirin lari ke dalam warung sambil memegang golok yang di kejar

Belanda dan akhirnya berhasil di tembak juga oleh Belanda. Meninggallah Sembilan orang di Jembatan Titiandalem tersebut.)”³⁰

Makam di atas dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan “Makam 9 Syuhada Pejuang PDRI”. Makam tersebut adalah makam buatan yang didalamnya tidak terdapat jasad dari anggota BPNK yang ditembak tentara Belanda. Makam itu dibuat pemerintah Kabupaten



Setelah pendudukan Kototinggi oleh tentara Belanda yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan berbagai pihak, St. Moh. Rasyid beserta keluarganya kemudian berpindah ke Baruahgunuang. Setelah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berdiri selama beberapa bulan, Belanda terus berupaya melacak keberadaan para pemimpin PDRI yang berlokasi di wilayah Suliki. Pada bulan April 1949, dua pesawat Mustang milik

Gambar 3. Makam 9 Pejuang PDRI, Pandam Gadang. Sumber: Dokumentasi Novrila Safitri

Limapuluhkota sebagai simbol untuk mengenang para pahlawan daerah yang telah gugur demi menyelamatkan republik. Adapun nama-nama pejuang itu, adalah: Syarif MP sebagai ketua BPNK, dan delapan anggotanya Engku Kayo Zakaria, Dirin, Nuin, Radian, Manus, Abas, Nyiak Ali, dan Mak Nirin.³¹ Di Nagari Suliki sebelumnya tentara Belanda menembak mati sebelas orang BPNK.

Belanda berputar-putar di langit Baruahgunuang dan mulai melakukan penembakan.³² Serangan udara tersebut mengakibatkan banyak warga Baruahgunuang mengalami luka-luka dan menjadi korban. Meskipun serangan terjadi tidak jauh dari kediaman keluarga St. Moh. Rasyid, mereka berhasil menyelamatkan diri.³³

Dalam situasi yang bergejolak ini, masyarakat Suliki hidup dalam kondisi penuh kehati-hatian. Setiap

³⁰ Wawancara dengan Dt. Rajo Imbang tanggal 23 September 2017 di rumahnya di Titiandalem Nagari Pandamgadang.

³¹ Lihat Rusli Said, *op.cit*

³² Lihat Marah Joenoes, *op.cit.* hlm. 121.

³³ *Ibid.*

kali melihat pesawat terbang melintas di udara Suliki, masyarakat segera bersembunyi; sebagian di antaranya berlindung ke dalam lubang-lubang bawah tanah yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai antisipasi terhadap kedatangan pasukan Belanda. Menurut penuturan Nurhanis:

“Urang awak maso Blando masuak baliak detu, itu iduk ndak aman. Stiok ado psawat lalu atau boputa-puta diateh, kami lansuang lari poi nyuruak, ado nan nyuruak ko dalam lubang-lubang dalam tanah nan sbelumnyo lah disiapkan kalau urang Blando tibo.

(Masyarakat kita masa Belanda kembali masuk hidup dengan tidak aman. Setiap ada pesawat terbang di langit Suliki, masyarakat langsung pergi sembunyi. Ada yang sembunyi ke dalam lubang-lubang dalam tanah yang sebelumnya sudah disiapkan kalau tentara Belanda datang.)”³⁴

Bagi masyarakat Suliki, revolusi menandai suatu fase baru dalam kehidupan mereka. Revolusi dipahami sebagai transformasi sosio-ekonomi dari kehidupan agraris menuju kehidupan baru yang merdeka di bawah naungan negara bernama Indonesia. Sebagai warga

negara baru, masyarakat Suliki harus siap memikul tanggung jawab sebagai pendukung Republik Indonesia. Ketika Suliki ditetapkan sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan geostrategis, yakni daerah yang dikelilingi bukit-bukit berhutan lebat serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam melalui Pelupuh dan Tiltang Kamang, Kabupaten Pasaman via Bonjol dan Tapus, serta terhubung ke Riau dan Sumatera Utara melalui jalan rahasia di Mahat. Faktor pendukung lainnya adalah kesuburan wilayah Suliki yang menjamin ketersediaan pasokan pangan bagi kelangsungan perjuangan, ditambah dengan partisipasi dan semangat militansi masyarakat yang tinggi.³⁵

Di samping peristiwa di Pandamgadang, masyarakat turut berpartisipasi dalam revolusi dengan membentuk berbagai bentuk pertahanan untuk menghadang laju tentara Belanda yang mengincar Kototinggi sebagai pusat pemerintahan PDRI. Mereka bergabung dalam berbagai kelaskaran bersifat semi-militer, seperti Laskar Tentara Wanita dan Tentara Cilik.³⁶ Strategi pertahanan yang disusun berdasarkan kearifan lokal meliputi perlindungan

³⁴ Wawancara dengan Nurhanis tanggal 24 September dirumahnya di Sungaisirih, Kototinggi.

³⁵ Lihat *Manuskrip, op,cit.* hlm. 7.

³⁶ *Ibid.*

Kototinggi dengan pemasangan ranjau dari bambu runcing yang

Sungainaning, Baruhgunung, Talanganau, Pandamgadang, dan



Gambar 4. RS PDRI di Suliki. Sumber: Dokumentasi Novril Safitri

ditanam rapat di sepanjang jalur masuk, serta penebangan pohon kelapa untuk dijadikan barikade jalan.

Selain perlawanan fisik terhadap Belanda, pemerintahan Kewedanaan Suliki juga mengalami transformasi struktural. Meningkatnya arus pengungsi dari keluarga pejuang yang mencari perlindungan dan melanjutkan perjuangan di Suliki mendorong dilakukannya reorganisasi wilayah. Berdasarkan hasil Sidang Kabinet Pemerintahan Militer di bawah instruksi Mr. St. Moh. Rasjid di Jorong Puardatar, wilayah Suliki dibagi menjadi dua kecamatan: Kecamatan Suliki dengan ibu kota Suliki, dan Kecamatan Gunung Mas beribu kota di Kototinggi. Kecamatan Gunung Mas membawahi enam kewalian, yaitu Kewalian Kototinggi,

Kototangah.³⁷

Revolusi juga membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat Suliki. Kehadiran pejabat PDRI dari berbagai latar etnis, khususnya Jawa dan Batak, memperluas wawasan keindonesiaan masyarakat setempat. Hal ini mendorong partisipasi aktif mereka dalam mendukung PDRI dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Dalam suasana revolusi, PDRI mendirikan SMP Perjuangan di Kototinggi, yang dipimpin oleh Ir. Mananti Sitompul—saat itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan PDRI—dengan tenaga pengajar seperti Datuk Hitam dan Djoeir Moehammad.³⁸ Sekolah ini terletak dekat pasar dan kantor wali perang Kototinggi, menempati sebuah gedung yang digunakan pagi

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁸ Lihat Mestika Zed, *op.cit.* hlm. 142.

hari untuk Sekolah Dasar dan sore hari untuk SMP Perjuangan. Siswa tidak diwajibkan membayar uang sekolah, namun yang dinilai mampu diharuskan membayar iuran sebesar setengah gantang beras per bulan.³⁹

Selain sektor pendidikan, masyarakat Suliki juga mendapat layanan kesehatan melalui rumah sakit darurat. Berikut adalah gambar bekas rumah sakit darurat yang didirikan di Suliki, tepatnya di Jorong Lakuang, pada masa PDRI.

Pelayanan kesehatan pada rumah sakit darurat tersebut bersifat sederhana dengan keterbatasan tenaga perawat dan ketersediaan obat-obatan. Adapun dokter yang bertugas adalah dr. Datuk Hitam, yang tiba bersama St. Moh. Rasyid di Kototinggi. Ia menjalankan tugasnya dengan berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya untuk mengobati berbagai penyakit masyarakat, seperti gatal-gatal, batuk, dan defisiensi vitamin.⁴⁰ Selanjutnya, menurut penuturan Ramsul—salah seorang putra dari anggota BNPK Suliki yang kerap mendengar cerita ayahnya—disebutkan bahwa:

“Dulu disiko di Jorong Lokuang ko maso PDRI ado rumah sakik darurat. Yo nan namonyo dulu yo ndo samo jo kini, kalau kini rumah sakik urang godang,

ancak- anak. Dulu tu bangunan kenek sa nyo, disitulah tompek urang borubek tu nyimpan ubek-ubek tapi yo sekedar sa nyo. Maso dulu tu pnyakik urang lai ndo parah-parah, sakik urang kotu itu dek kua, masuak angin, gata-gata, sakik palo. Dokter nyo kotu itu namonyo Tuak Itam, Tuak Itam ko suko kliliang-kliliang kampuang manengok-nengok keadaan masyarakat. Kini ko bangunan rumah sakik dulu lah jadi rumah tingga guru SD, tapi kini ndo bounyi leh, rumah tingga. (Dahulu di Jorong Lakuang masa PDRI ada rumah sakit darurat. Yang namanya dulu berbeda dengan sekarang, kalau sekarang rumah sakit besar, bagus-bagus. Dulu bangunannya kecil, disitulah tempat orang berobat dan menyimpan obat-obatan sekedarnya. Masa dulu penyakit orang tidak parah, sakit yang diderita seperti: batuk, masuk angin, gatal-gatal, sakit kepala. Dokternya waktu itu bernama Datuk Hitam, beliau suka keliling-keliling kampung melihat-lihat keadaan masyarakat. Sekarang bangunan rumah sakit darurat itu sudah dijadikan rumah tempat tinggal guru SD, tetapi

³⁹ Wawancara dengan Dt. Rajo Imbang tanggal 23 September 2017 dirumahnya di Titiandalam, Nagari Pandamgadang.

⁴⁰ *Manuskrip, op.cit.* hlm. 10.

sekarang tidak ada yang menempati.).”⁴¹

Di bidang keamanan, para pengungsi yang tergabung dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Suliki mendapat perlindungan khusus. Setiap pergerakan mereka selalu dikawal oleh sejumlah anggota Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK). Lebih lanjut, membanjirnya pengungsi ke Suliki pada masa awal berdirinya PDRI mendorong terjadinya integrasi yang erat antara masyarakat lokal dan para pendatang, yang terutama diwadahi melalui pendirian dapur umum. Layanan konsumsi untuk rombongan PDRI dikelola oleh seksi dapur umum, yang secara rutin—hampir setiap minggu—menyembelih seekor sapi yang diperoleh melalui bagian perbekalan.⁴² Beberapa titik lokasi di wilayah Suliki kemudian didirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan harian. Penyediaan nasi bungkus bagi para pengungsi tidak hanya bersumber dari Nagari Kototinggi, melainkan juga datang dari berbagai nagari di sekitar Suliki seperti Talanganau, Pandamgadang, Baruahgunuang, dan Kototangah. Keterlibatan kaum wanita dalam mengoperasikan dapur umum di kawasan ini melengkapi narasi perjuangan kemerdekaan dengan menunjukkan partisipasi

aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan kesaksian lisan Eda Refni, anak dari kepala dapur umum di Nagari Talanganau yang bernama Lamiah, sebagaimana sering diceritakan kembali oleh ibunya, disebutkan bahwa:

“Bagian dapua umum maso PDRI dulu itu sangat sibuk, karno kan harus mamasakan boratuh-ratuh urang stiok arinyo. Tugasnyo khusus mamasakan, nan mancatat-catat itu tugas kapalo dapua umum. Ado nan laki-laki botugas untuak ngumpuan boreh dari rumah ko rumah. Ndak hanyo boreh kotu itu, tapi ubi ko a iyo juo, dek ubi lai bisa dibuek godok untuak urang-urang PDRI tu. Nasi bungkuh tu pasti stiok arinyo. Dapua umum ko ado di stiok ngori-ngori di daerah Slikih. Bekoh makanan nan lah siap dibagikan untuak urang PDRI tu ado lo urang-urang nan mangumpuannyo tu dibao ko Kototinggi.

(Bagian dapur umum masa PDRI dahulu itu sangat sibuk, karena harus memasak ratusan orang setiap harinya. Tugasnya khusus memasak, yang mencatat-catat

⁴¹ Wawancara dengan Ramsul tanggal 30 Juli 2017 di rumahnya, Jorong Lakuang, Nagari Kototinggi.

⁴² Wawancara dengan Eda Refni 05 Januari 2018 di rumahnya di Talanganau.

itu tugas kepala dapur umum. Ada yang laki-laki bertugas untuk mengumpulkan beras dari rumah ke rumah. Tidak hanya beras waktu itu, tapi ubi iya juga, karena ubi bisa dibuat godok untuk orang-orang PDRI. Nasi bungkus pasti dibuat setiap harinya. Dapur umum ini ada di setiap nagari-nagari di daerah Suliki. Setelah makanan siap dibagikan untuk orang PDRI nanti ada orang-orang yang bertugas mengumpulkannya lalu dibawa ke Kototinggi.)”⁴³

“Petite Histoire” di Suliki Masa Revolusi Tragedi Titian Dalam

Petite Histoire atau sejarah kecil merujuk pada peristiwa-peristiwa masa lampau yang berskala terbatas namun sarat dengan nilai human interest.⁴⁴ Bagian ini merekonstruksi sejarah kecil masyarakat Suliki pada masa revolusi, yang bersumber dari ingatan personal individu-individu yang mengalami peristiwa tersebut maupun memori generasi berikutnya yang menerima cerita secara turun-temurun. Pengumpulan kisah-kisah ini melibatkan beberapa narasumber kunci. Salah satunya adalah Inar (67 tahun), saudara kandung dari Abas, seorang anggota BPNK yang menjadi

korban kekerasan tentara Belanda, yang kini bertempat tinggal di Jorong Kotomarapak, Pandamgadang, Suliki. Narasumber lain meliputi Eda Refni (54 tahun), anak dari kepala dapur umum Nagari Talanganau yang berprofesi sebagai petani; Sudirman (78 tahun), anak dari Wali Perang Nagari Talanganau; serta Dt. Rajo Imbang (78 tahun), yang merupakan saksi mata langsung dari kekerasan yang dilakukan tentara Belanda di Titiandalam, Suliki. Salah satu fragmen memori kolektif yang paling mendalam adalah Tragedi “Titiandalam” pada Januari 1949. Revolusi fisik memang menghasilkan narasi penderitaan masyarakat dalam upaya mempertahankan Republik Indonesia, dengan korban berjatuhan dari berbagai kelompok, termasuk Barisan Penjaga Nagari dan Kota (BPNK) yang bertugas menjaga keamanan wilayah. Tragedi “Titiandalam” tersebut, sebagaimana diingat oleh Inar yang kehilangan saudaranya, Abas, dalam peristiwa itu, menjadi salah satu episode kelam yang membekas dalam ingatan komunitas lokal.

“Abas elok urangnyo, rajin mongaji, rajin sembayang. Tinggih smangeknyo tu dek soto nyo BPNK. Kami keluarga ndak tau dan ndak nyangko samo skali kalau nan mati ditembak Blando tu Abas bagai. Rumah

⁴³ Wawancara dengan Eda Refni tanggal 30 Juli 2017 dirumahnya, Nagari Talanganau.

⁴⁴ Lihat Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 1* (Jakarta: Kompas, 2004).

wak jauh diatehkan, jadi lambek dapek koba. Lah bisuak arinyo baru ado urang nan moagiah tau, amak kotu itu sodang diporak jo mendiang amai tu apak tibo urang ngatoan kalau Abas ndoleh. Lansuang amai toduduak ndonganyo, amak lah nangih pulo. Sudah tu poilah apak amak jo urang tu ko Titian Dalam, kecek urang tu kodikubukaan sa ciek sdoannyo dek keadaan ndak aman kan. Takuk Blando tibo liak. Amak jo amai dirumah sa ndo buliah kolua takuk konai tembak pleh. Tkona jeh dek amak, amai ndo omuah makan bra ari sudah itu, tkona toruh anak bujangnyo.

(Abas baik orangnya, rajin mengaji, rajin sembayang. Tinggi semangatnya itulah makanya ia bergabung dengan BPNK. Kami keluarga tidak tahu dan tidak menyangka sama sekali kalau yang mati ditembak Belanda itu termasuk Abas. Rumah jauh diatas, jadi lama dapat kabar. Besok harinya baru ada orang yang memberi tahu, *amak* waktu itu sedang di ladang dengan mendiang *amai* dan bapak datang orang mengatakan kalau Abas sudah tiada. Langsung saja *amai* terduduk lemas mendengarnya, *amak*

pun langsung manangis. Setelah itu pergilah bapak dengan orang itu ke Titian Dalam, katanya akan dilakukan penguburan massal karena keadaan tidak aman. Takut Belanda datang lagi. *Amak* dan *amai* dirumah saja tidak boleh keluar takut ditembak pula. Masih teringat oleh *amak*, *amai* tidak mau makan beberapa hari setelah kejadian itu, teringat terus anak bujangnya.)⁴⁵

Pada hari Senin, 10 Januari 1949, informasi mengenai masuknya pasukan Belanda ke daerah Suliki tersebar dengan cepat.⁴⁶ Menghadapi situasi tersebut, Dahlan Ibrahim, Komandan Teritorial TNI Sumatera Barat, beserta sejumlah ajudannya yang saat itu berada di sebuah surau dekat Suliki, segera bergerak menuju Kototinggi. Sepanjang perjalanan, disampaikanlah kabar bahwa tentara Belanda telah memasuki wilayah Suliki. Sambil berteriak-teriak, anggota Badan Perjuangan Nagari dan Kota (BPNK) memerintahkan penduduk untuk segera mengungsi ke kawasan hutan yang dinilai lebih aman. Para anggota BPNK pun langsung mengambil tindakan dengan membelintangkan batu-batu berukuran besar serta menebang pohon-pohon untuk menghambat pergerakan kendaraan tempur musuh.⁴⁷ Salah satu upaya strategis

⁴⁵ Wawancara dengan Inar tanggal 08 Januari 2018 dirumahnya di Kotomarpak Nagari Pandamgadang.

⁴⁶ Lihat Mestika Zed, *op.cit.* hlm. 135.

⁴⁷ Lihat Rusli Said, *op.cit.*

untuk memutus jalur logistik dan mobilitas pasukan Belanda adalah dengan membongkar Jembatan Titiandalam, yang terbuat dari material kayu. Jembatan tersebut terletak di Jorong Kotomarapak, tepatnya di perbatasan antara Nagari Pandamgadang dan Kototinggi.

Dengan semangat juang dan kewaspadaan tinggi, BPNK di bawah pimpinan Syarif MP beserta anggotanya bekerja membongkar jembatan kayu itu gangan menghalangi gerak maju tentara Belanda menuju Kototinggi. Namun, di tengah upaya mereka yang hampir selesai, tiba-tiba datang pasukan Belanda yang terdiri atas satu truk dan empat jip yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap.⁴⁸ Kontak senjata yang sengit segera terjadi antara kedua belah pihak. Pasukan Belanda berhasil meredam serangan yang dilancarkan oleh anggota BPNK pimpinan Syarif MP. Dengan kekerasan yang berlebihan, Belanda menembaki para pejuang BPNK hingga mengakibatkan gugurnya sembilan orang anggota BPNK di lokasi tersebut pada hari itu. Mereka yang gugur sebagai bunga bangsa terdiri dari Syarif MP selaku ketua BPNK, serta delapan anggotanya, yaitu Zakaria, Dirin, Nuin, Radian, Manus, Nyiak Ali, Mak Nirin, dan Abas. Para anggota BPNK yang

menjadi korban tersebut berasal dari berbagai nagari di sekitar Suliki.⁴⁹

Peristiwa tragis itu disaksikan dari kejauhan oleh Dt. Rajo Imbang, yang berada di atas bukit. Dalam ingatannya, ia menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda terhadap para anggota BPNK di Titiandalam,

“Pas Blando tibo dulu, datuak jo masyarakat lari manyolamatkan diri. Datuak diateh bukit kan, nampak sa tontara Blando monembak BPNK. Bacokak BPNK jo Blando di Titiandalam tu dulu. Ngori awak nengoknyo. Datuak sa sudah itu ndo tolok ko jalan bawah tu dek takuk.

(Pas Belanda datang dulu, *datuk* dan masyarakat lari menyelamatkan diri. *Datuk* diatas bukit, melihat tentara Belanda menembak BPNK. Berkelahi BPNK dengan Belanda di Titiandalam itu dulu. Ngeri kita melihatnya. *Datuk* saja sesudah itu tidak berani ke jalan bawah itu karena takut.)”⁵⁰

Belanda berhasil mencapai Kototinggi. Berkat upaya Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK), nagari tersebut telah dikosongkan dan masyarakat telah mengungsi ke hutan-hutan di sekitarnya. Di Jorong

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Wawancara dengan Dt. Rajo. Imbang 09 Januari dirumahnya di Pandamgadang.

Kampungmelayu, pasukan Belanda menemukan sebuah meriam yang sengaja ditempatkan dengan posisi menghadap ke timur. Mereka mencurigai adanya penyerpapan dan langsung menembaki meriam tersebut, yang sekaligus menjadi tanda bagi penduduk setempat bahwa pasukan Belanda telah tiba di Kototinggi. Selanjutnya, pasukan Belanda melanjutkan operasi militer menuju Puardatar. Setibanya di sana, mereka segera mencari pemancar radio. Hampir saja mereka menemukan pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) yang hanya berjarak beberapa meter, namun telah disembunyikan oleh para pejuang dengan daun pisang, ilalang, dan bahan lain. Gagal menemukan pemancar tersebut, pasukan Belanda kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah-rumah penduduk.

Kemudian, pasukan Belanda bergerak menuju Jorong Sungaisirih, namun mendapati jorong tersebut telah kosong. Mereka tidak berlama-lama di sana; setelah menggeledah rumah-rumah, mereka kembali ke Pasar Kototinggi. Di pasar, pasukan Belanda membakar dua mobil milik pejabat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang mereka temukan. Setelah berada di Kototinggi selama kurang lebih sebelas jam, pasukan Belanda akhirnya kembali ke arah Payakumbuh.⁵¹

Berbuka Puasa dengan Ubi Manis

Berbuka puasa merupakan momen yang sangat dinantikan masyarakat pada masa itu. Masyarakat berbondong-bondong bersama para pejabat PDRI untuk berbuka dengan penuh kesederhanaan, yang menjadi ciri khas masyarakat Suliki. Saat itu, dapur umum didirikan untuk menyiapkan dan menangani kebutuhan makan para pejabat PDRI. Salah satu kreasi dari ibu-ibu di dapur umum adalah menyajikan hidangan buka puasa “khas revolusi”. Menu buka puasa pada waktu itu berupa ubi manis yang diolah menjadi kolak, onde-onde, dan tumbuk ubi. Dalam pembuatan kolak, untuk menghasilkan rasa manis, ibu-ibu di dapur umum tidak menggunakan gula pasir melainkan gula enau (aren). Gula enau pada masa itu relatif mudah diperoleh, terutama dari Nagari Talanganau yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani gula enau. Sementara itu, tumbuk ubi dibuat dari ubi rebus yang dihancurkan atau ditumbuk menggunakan lesung, kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan irisan halus gula aren.

Selain menyantap hidangan manis saat berbuka, sebelum berangkat salat Tarawih, mereka makan terlebih dahulu dengan nasi dan lauk-pauk seadanya. Salah satu

⁵¹ Mestika Zed, *op.cit.* hlm. 152.

gulai yang disiapkan oleh dapur umum adalah gulai pepaya muda. Pepaya pada masa itu mudah didapat dan relatif sederhana dalam proses pengolahannya.

“Bulan puasa maso PDRI dulu, bagian dapua umum mambuek pabukoan untuak urang-urang PDRI tu kadang kolak ubi, kadang godok ubi, kadang tumbuek ubi, pokoknyo ubi ko lah nan dibuek makanan. Dulu ubi tu nan murah mandapekkannyo jo maolahnyo jadi makanan. Gulai untuak makan ndak dagiang toruh deh, klikih ko a digulai juo, mandapakannyo murah mambuek gulainyo ndak lo payah. Dulu paso tu sederhana sa nyo, untuak pabukoan ndak banyak ajak nan kini ko mocomnyo. Dulu susah iduk urang, lah bisa makan lah bosyukur bona urang kotu itu. Ndak samo jo nan kini, kini lah ado pasa pabukoan ampia di stiok-stiok ngori ado.

(Bulan puasa masa PDRI dahulu, bagian dapur umum membuat takjil untuk orang-orang PDRI itu kadang kolak ubi, kadang godok ubi, kadang tumbuk ubi, pokoknya ubi lah yang dibuat makanan. Dahulu ubi itu yang mudah mendapatkannya dan

mengolahnya jadi makanan. Gulai untuk makan tidak selalu daging, pepaya di gulai juga. Dahulu puasa itu dengan sederhana saja, untuk berbuka tidak banyak seperti sekarang ini macamnya. Dahulu susah hidup orang, sudah bisa makan saja orang sangat bersyukur pada waktu itu. Tidak sama dengan sekarang, sekarang sudah ada pasar berbuka hampir di setiap-setiap nagari ada.)”⁵²

Bulan Ramadan bagi masyarakat Suliki memiliki makna spiritual yang mendalam, terlebih dalam konteks periode Revolusi Nasional. Ramadan pada tahun 1949 disambut dengan semangat dan kegembiraan yang luar biasa, menandai momen yang lebih istimewa dibandingkan peringatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pelaksanaan salat Tarawih pada Ramadan-ramadan sebelumnya telah diwarnai sukacita, pada tahun tersebut terdapat dimensi khusus yang dikenang masyarakat, yakni kehadiran sejumlah pejabat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang bertindak sebagai penceramah. Salah satu kenangan yang tertanam dalam ingatan Sudirman adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Ismail Hasan selama ceramahnya.[3] Ismail Hasan, seorang sarjana hukum yang

⁵² Wawancara dengan Eda Refni 05 Januari 2018 dirumahnya di Talanganau.

tiba di Suliki bersama rombongan PDRI lainnya, menyampaikan ceramah yang menyentuh aspek kekeluargaan dan semangat kebangsaan. Dalam pidatonya, ia menekankan harapan agar hubungan kekeluargaan yang telah terbina antara masyarakat Suliki dan para pejabat PDRI dapat dipertahankan, sekaligus mendorong peningkatan rasa cinta tanah air dan nasionalisme terhadap Republik Indonesia yang masih muda.

“Keadaan bulan puaso sudah merdeka tu, surou-surou rami dek anak-anak sudah babuko lah poi mongaji, kalau kini lai juo rami tapi ndak sarami dulu. Nan maso PDRI tu ado pejabat PDRI nan maagiah ceramah sudah tarawiah di masojik Slikih namonyo Ismail Hasan. Masyarakat sonang hatinyo diagiah ceramah dek urang jauh kotu itu, biasonyo urang awak sa nan cramah. Apolai olun tuoh-tuoh bona buya nyo lai, tu smangeknyo dalam nyampaian ceramah.

(Keadaan bulan puasa sesudah merdeka, surau-surau ramai dengan anak-anak setelah berbuka sudah pergi mengaji, kalau sekarang ramai juga tetapi tidak seramai dahulu. Masa PDRI ada pejabat PDRI

yang memberi ceramah setelah Tarwih di mesjid Suliki namanya Ismail Hasan. Masyarakat senang hatinya diberi ceramah oleh orang jauh waktu itu, biasanya orang kampung sendiri yang ceramah. Apalagi belum tua-tua amat buyanya, terus penuh semangat dalam menyampaikan ceramah.)”⁵³

Abas Sang Pengawal Revolusi

Abas, seorang pemuda yang berasal dari daerah Suliki, dilahirkan pada tahun 1932 di Jorong Kotomarpak, Nagari Pandamgadang. Ia terlahir dalam keluarga petani; kedua orang tuanya sehari-hari bekerja di sawah dan ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Abas berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Pandamgadang. Ia dikenal memiliki karakter yang teguh, penuh semangat, serta sikap pantang menyerah. Menjelang akhir tahun 1948, ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berdiri di Kototinggi, Abas tergerak untuk bergabung dengan Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) guna ikut menjaga keselamatan para pimpinan PDRI. Meskipun awalnya mendapat penolakan dari orang tuanya yang khawatir akan keselamatannya, dengan tekad yang

⁵³ Wawancara dengan Sudirman tanggal 05 Januari 2018 di rumahnya di Nagari Talanganau.

kuat Abas berhasil meyakinkan mereka bahwa ia akan tetap selamat selama menjalankan tugas pengawasan terhadap pejabat-pejabat PDRI di Kototinggi.

Selama menjadi anggota BPNK di Kototinggi, Abas melaksanakan serangkaian tugas bersama rekan-rekannya. Tugas-tugas tersebut antara lain menjadi kurir untuk pengiriman surat maupun barang-barang milik PDRI secara berantai dari satu jorong ke jorong lain, maupun antar nagari. Dengan penuh disiplin, ia bertugas menerima dan memeriksa para tamu yang hendak menemui pejabat PDRI, serta mengawasi lalu lintas tamu yang melintas di wilayah Kototinggi. Sistem pengamanan yang dijalankan bersifat ketat dan dilaksanakan selama 24 jam setiap hari. Selain itu, Abas turut membantu penguatan di sejumlah front pertahanan di wilayah Limapuluh Kota dan Payakumbuh, seperti Front Palupuh dan Front Utara Payakumbuh. Ia juga terlibat dalam mengatur proses pengungsian penduduk saat musuh mendekat, serta menyelamatkan barang-barang berharga milik pemerintah.⁵⁴

Seluruh tugas yang dipercayakan kepadanya dijalankan oleh Abas dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Namun, ia meninggal dalam usia muda pada peristiwa yang dikenal sebagai “Tragedi Januari” di Titiandalam.

Saat itu, Abas bersama anggota BPNK lainnya sedang menjalankan tugas membongkar sebuah jembatan ketika secara tiba-tiba diserang dan ditembaki oleh tentara Belanda. Tanpa dapat memberikan perlawanan yang berarti, Abas dan rekan-rekannya gugur di tempat. Jenazah mereka baru dapat dimakamkan sehari setelah kejadian, di sekitar lokasi Titiandalam. Dikarenakan kondisi keamanan yang masih sangat tidak stabil pada masa itu, jasad Abas tidak dapat dipulangkan ke kampung halamannya di Kotomarpak.

Sumber primer dari arsip keluarga dan kesaksian kolega BPNK, sebagaimana didokumentasikan dalam koleksi sejarah lisan PDRI Limapuluh Kota. Inar, adik sepupunya menceritakan,

“Abas 16 umuanyo baru kotu soto jadi pengawal pejabat PDRI di Puah tu dulu. Keadaan keluarga yo biaso-biaso sa nyo, urang ko sawah ko porak urang gaek kami nyo. Dulu tu kan payah iduk, sado-sadonyo payah. Tapi syukur lai tomat juo skolanyo, Abas soto Sekolah Rakyat di Pandamgodang. Pandai inyo skola, gigiah urangnyo. Inyo soto jadi BPNK, ado urang nan moagiah tau nyo, inyo lansuang nio, koreh atinyo nak ko Puah. Urang gaek ndo moloheh inyo poi, takuk kok

⁵⁴ Lihat *Manuskrip, op.cit.* hlm. 20.

ba'a-ba'a nyo inyo di Puah tu. Tapi akhia nyo topaso dilopehan inyo poi.

Abas baru 16 Tahun umurnya waktu ikut jadi pengawal pejabat PDRI di Puah (sebutan sehari-hari masyarakat Kecamatan Gunuangomah untuk Kototinggi) dulu. Keadaan keluarga ya biasa-biasa saja, orang ke sawah ke ladang orangtua kami. Dahulu itu susah hidup, semuanya susah. Tetapi syukur tamat juga sekolahnya, Abas ikut Sekolah Rakyat di Pandamgadang. Pandai dia sekolah, gigih orangnya. Dia ikut jadi BPNK, ada orang yang memberitahunya, dan dia langsung mau, keras hatinya mau ke Puah. Orangtua tidak melepas dia pergi, takut terjadi apa-apa dengan dia di Puah. Tetapi akhirnya dengan terpaksa dilepaskan juga dia pergi.”⁵⁵

Kesimpulan

Revolusi di Suliki menegaskan dirinya sebagai sebuah fragmen integral dari narasi besar Revolusi Nasional Indonesia. Meskipun secara geografis terletak di pedalaman Sumatera Barat, wilayah ini menunjukkan respons yang cepat dan penerimaan yang

jas terhadap proklamasi kemerdekaan, yang menjadi fondasi ideologis perjuangan tersebut. Namun, momentum revolusioner mencapai puncaknya baru pada periode kritis Agresi Militer Belanda Kedua dan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada akhir 1948. Dalam konteks darurat ini, Kewedanaan Suliki terpilih menjadi salah satu lokus strategis yang memegang peran kunci. Pemilihannya sebagai basis PDRI bukanlah suatu kebetulan, melainkan merefleksikan faktor keamanan dan dukungan sosial yang justru menjadikan kontribusinya selama periode tersebut sangat signifikan bagi kelangsungan Republik.

Karakter dan respons masyarakat Suliki terhadap revolusi memperlihatkan dinamika yang khas. Dukungan mereka tidak sepenuhnya digerakkan oleh doktrin politik yang abstrak, tetapi lebih didasari oleh kesadaran kebangsaan yang dalam serta solidaritas praktis terhadap para elite dan pengungsi yang mencari perlindungan. Persatuan yang terbentuk lebih dimotivasi oleh visi kolektif akan masa depan dan perubahan sosial yang optimis pasca-kolonial, sehingga menunjukkan bagaimana cita-cita revolusi

⁵⁵ Wawancara dengan Inar tanggal 07 Februari 2018 di rumahnya di Kotomarapak Nagari Pandamgadang.

nasional diartikulasikan dan dihidupi oleh masyarakat akar rumput. Dalam hal ini, revolusi di Suliki mengungkap peran aktif rakyat biasa sebagai *agent* historis yang sah, yang keterlibatannya merupakan bagian dari upaya untuk mengklaim peran dalam tatanan dunia baru.

Pemuda-pemuda Suliki muncul sebagai produk sekaligus pelaku utama dalam dinamika ini. Mereka adalah generasi yang bertindak untuk menjaga entitas negara yang mereka warisi, dengan pemahaman yang mungkin sederhana namun mendalam tentang konsep kemerdekaan dan kebangsaan. Aksi mereka, yang sering kali dilandasi semangat lebih daripada perhitungan taktis yang matang, justru menunjukkan komitmen genuin untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan. Dengan demikian, pemuda-pemuda ini tidak hanya menjadi bagian dari pasukan PDRI, tetapi juga mewujudkan sumber daya moral dan fisik yang menggerakkan perjuangan di tingkat lokal.

Di balik narasi perang dan pengorbanan, revolusi di Suliki juga memperlihatkan dimensi humanis yang kuat. Relasi yang terbangun antara pejabat PDRI dan masyarakat setempat

dicirikan oleh keakraban dan semangat kekeluargaan, menciptakan ekosistem dukungan yang bersifat relasional dan sukarela. Dukungan material dan moral yang diberikan tanpa pamrih ini menjadi tulang punggung logistik dan psikologis yang memungkinkan kelangsungan pemerintahan darurat, sekaligus menunjukkan bahwa revolusi tidak semata-mata diisi oleh heroisme militer, tetapi juga oleh jaringan solidaritas sosial yang intim.

Secara historiografis, kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan sejarah lokal dalam memahami mosaik Revolusi Nasional. Pengalaman Suliki yang unik selama fase akhir perang Indonesia-Belanda menunjukkan bagaimana daerah pedalaman justru dapat bertransformasi menjadi pusat perubahan dan pergerakan nasional, suatu "kota" dalam makna politis dan simbolis. Studi ini mengungkap bahwa perubahan besar dapat dipicu dan dipertahankan dari pinggiran, serta menawarkan perspektif tentang ketahanan Republik yang justru bersumber dari komitmen komunitas-komunitas lokal seperti Suliki, yang dengan caranya sendiri menjembatani yang nasional dengan yang sehari-hari.

Referensi

- Anwar, Rosihan. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Isnaini, Jon. "Nagari Kototinggi Pada Masa PDRI (1948-1949)." Skripsi. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1996.
- Joenoos, Marah. *MR.H. ST. Moh. Rasjid: Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani, dan Jujur*. Pekanbaru: PT. Cerya Riau Mandiri Printing, 2013.
- Kahin, George McTurnan. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS dan Sinar Harapan, 1995.
- "Perjuangan-perjuangan PDRI." Manuskrip. 1980. (Dianggap sebagai koleksi pribadi atau arsip).
- Said, Rusli. *Mengenang dan Memperingati Peristiwa Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Kumpulan Makalah PDRI*. (Tempat dan penerbit tidak disebutkan, dicantumkan sebagaimana adanya).
- Saiful SP. *Luhak Lima Puluh Kota Basis Pemerintah Darurat Republik Indonesia*. Sarilamak: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, 2009.
- "Sumber-sumber Dana Perjuangan PDRI." Manuskrip. Disusun oleh N. Datuk Majo Tuan dan R. Datuk Boyom. (Dianggap sebagai koleksi pribadi atau arsip).
- Zed, Mestika. *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2004.
- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Sumber | Wawancara | (Koleksi | Pribadi): |
| Dt. Rajo Imbang. | Wawancara oleh penulis. | Titindalam, | Nagari |
| Pandamgadang, | 23 | September | 2017. |
| ———. | Wawancara oleh penulis. | Pandamgadang, | 09 Januari 2018. |
| Eda Refni. | Wawancara oleh penulis. | Nagari Talang Anau, | 30 Juli 2017. |
| ———. | Wawancara oleh penulis. | Talanganau, | 05 Januari 2018. |
| Inar. | Wawancara oleh penulis. | Kotomarapak, | Nagari Pandamgadang, |
| 08 | | Januari | 2018. |
| ———. | Wawancara oleh penulis. | Kotomarapak, | Nagari Pandamgadang, |
| 07 | | Februari | 2018. |
| Nurhanis. | Wawancara oleh penulis. | Sungaisirih, | Kototinggi, |
| September | | | 2017. |
| Ramsul. | Wawancara oleh penulis. | Jorong Lakuang, | Nagari Kototinggi, |
| 30 | | Juli | 2017. |
| Sudirman. | Wawancara oleh penulis. | Nagari Talanganau, | 29 Juli 2017. |
| ———. | Wawancara oleh penulis. | Nagari Talanganau, | 05 Januari 2018. |